



Pemerintah Provinsi Jawa Timur
BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR
DI MADIUN



LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNAUDITED



Pemerintah Provinsi Jawa Timur
BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR
DI MADIUN



LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNAUDITED

I. DAFTAR ISI

I.	DAFTAR ISI	1
II.	DAFTAR TABEL	3
III.	KATA PENGANTAR	3
IV.	PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	6
V.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
VI.	NERACA	8
VII.	LAPORAN OPERASIONAL	9
VIII.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
IX.	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
A.	PENDAHULUAN	11
1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan	11
2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	11
3.	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	13
B.	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	13
1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	14
C.	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	15
	Rincian dan Penjelasan Masing-masing	
	Pos Laporan Keuangan SKPD :	15
1.	Laporan Realisasi Anggaran	
(1)	Pendapatan Daerah	15
(2)	Belanja Daerah	16
(3)	Pembiayaan	16
2.	Neraca	
(1)	Aset	16
(2)	Kewajiban	22
(3)	Ekuitas	23

3.	Laporan Operasional	
	(1) Pendapatan - LO	23
	(2) Beban - LO	23
	(3) Surplus / Defisit -LO.....	24
4.	Laporan Perubahan Ekuitas	
	(1) Ekuitas Awal	24
	(2) Surplus/Defisit – LO.....	24
	(3) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.....	24
	(4) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	24
	(5) Ekuitas Akhir.....	24
D.	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	25
E.	PENUTUP.....	25

II. DAFTAR TABEL

1. TABEL DAFTAR PERSEDIAAN	17
2. TABEL MUTASI ASET TETAP	18
3. TABEL MUTASI PENYUSUTAN ASET TETAP.....	20
4. TABEL DAFTAR ASET EKSTRAKOMTABEL	21
5. TABEL ASET LAIN-LAIN.....	21
6. RINCIAN JENIS ASET LAIN-LAIN	22
7. TABEL PERUBAHAN PEJABAT BAKORWIL I MADIUN	25

III. KATA PENGANTAR

Kami atas nama Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) menyajikan Laporan Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Bakorwil I Madiun Tahun 2023 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor DPPA/B.1/5.07.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Bakorwil I Madiun Tahun 2023, maka Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) menyajikan Laporan Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) Tahun 2023. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Laporan Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) Tahun 2023 ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) secara operasional disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

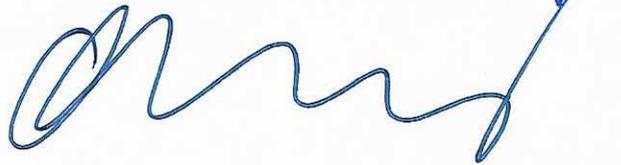
2. **Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023** memberikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan sebesar **Rp.36.762.047,00** atau **154,46 persen** dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2023. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer sebesar **Rp. 16.623.112.491,00** atau **96.00 persen** dari yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2023, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar **Rp. 16.586.350.444,00** dan Pembiayaan Netto terealisasi sebesar **Rp. 16.623.112.491,00** atau **96.00 persen**. Sehingga dari perangkaan tersebut terdapat Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp.(16.586.350.444,00)**.
3. **Neraca** menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023. Dari neraca diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar **Rp 33.076.148.235,00** dan kewajiban adalah sebesar **Rp 31.556.483,00** sehingga ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 33.044.591.752,00**.
4. **Laporan Operasional** menyajikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dari laporan operasional diperoleh informasi bahwa pendapatan daerah adalah sebesar **Rp. 36.762.047,00**. Beban daerah adalah sebesar **Rp. 17.323.276.719,00**, dan Defisit LO adalah sebesar **Rp. 17.286.514.672,00**.
5. **Laporan Perubahan Ekuitas** menyajikan informasi tentang saldo ekuitas sebesar **Rp. 33.044.591.752,00**.
6. **Catatan atas Laporan Keuangan** dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) merupakan salah satu komponen penyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan hasilnya merupakan tolok

ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (stakeholders) laporan keuangan ini. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) akan terus berupaya untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

Madiun, 31 Desember 2023

KEPALA BAKORWIL I MADIUN



R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670221 198809 1 001

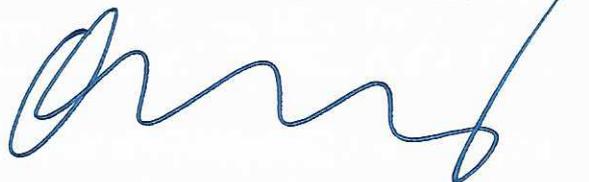
IV. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional; (v) Laporan Arus Kas; (vi) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Madiun, 31 Desember 2023

KEPALA BAKORWIL I MADIUN



R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670221 198809 1 001

V. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : (507) PENGELOLAAN PENGHUBUNG
ORGANISASI : (000000020000) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah P.A.PBD	Realisasi	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6=(4-3)	7
4	PENDAPATAN DAERAH	23.800.000,00	36.762.047,00	154,46	12.962.047,00	54,46
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.800.000,00	36.762.047,00	154,46	12.962.047,00	54,46
4 1 02	Retribusi Daerah	9.000.000,00	17.500.000,00	194,44	8.500.000,00	94,44
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	14.800.000,00	19.262.047,00	130,15	4.462.047,00	30,15
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		23.800.000,00	36.762.047,00	154,46	12.962.047,00	54,46
5	BELANJA DAERAH	17.316.476.000,00	16.623.112.491,00	96,00	(693.363.509,00)	-4,00
5 1	BELANJA OPERASI	17.273.175.000,00	16.581.291.335,00	95,99	(691.883.665,00)	-4,01
5 1 01	Belanja Pegawai	12.432.404.000,00	11.786.416.022,00	94,80	(645.987.978,00)	-5,20
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.771.000,00	4.794.875.313,00	99,05	(45.895.687,00)	-0,95
5 2	BELANJA MODAL	43.301.000,00	41.821.156,00	96,58	(1.479.844,00)	-3,42
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.301.000,00	41.821.156,00	96,58	(1.479.844,00)	-3,42
JUMLAH BELANJA DAERAH		17.316.476.000,00	16.623.112.491,00	96,00	(693.363.509,00)	-4,00
SURPLUS / (DEFSIT)		(17.292.676.000,00)	(16.586.350.444,00)	95,92	706.325.556,00	-4,08
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)		(17.292.676.000,00)	(16.586.350.444,00)	95,92	706.325.556,00	-4,08

Madiun, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM.

NIP. 19670221 198809 1 001

VI. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun
NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	ASET		33.076.148.235,00	33.478.153.721,00
11	ASET LANCAR		713.200,00	696.800,00
1101	Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
1112	Persediaan		713.200,00	696.800,00
13	ASET TETAP		33.075.435.035,00	33.477.456.921,00
1301	Tanah		29.475.500.000,00	29.475.500.000,00
1302	Peralatan dan Mesin		9.052.138.135,00	8.141.712.979,00
1303	Gedung dan Bangunan		6.184.410.774,00	6.184.410.774,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		34.980.000,00	34.980.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya		44.044.800,00	44.044.800,00
1307	Akumulasi Penyusutan		(11.715.638.674,00)	(10.403.191.632,00)
15	ASET LAINNYA		0,00	0,00
1504	Aset Lain-lain		18.550.000,00	18.550.000,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(18.550.000,00)	(18.550.000,00)
	JUMLAH ASET		33.076.148.235,00	33.478.153.721,00
2	KEWAJIBAN		31.556.483,00	36.622.049,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		31.556.483,00	36.622.049,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
2106	Utang Belanja		31.556.483,00	36.622.049,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		31.556.483,00	36.622.049,00
3	EKUITAS		33.044.591.752,00	33.441.531.672,00
31	EKUITAS		33.044.591.752,00	33.441.531.672,00
3101	Ekuitas		33.044.591.752,00	33.441.531.672,00
310101	Ekuitas		50.331.106.424,00	49.384.540.295,00
310102	Surplus/Defisit-L0		(17.286.514.672,00)	(15.943.008.623,00)
	JUMLAH EKUITAS		33.044.591.752,00	33.441.531.672,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.076.148.235,00	33.478.153.721,00

Madiun, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM.

NIP. 19670221 198809 1 001

VII. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL						
1	PENDAPATAN DAERAH-LO		36.762.047,00	23.095.672,00	13.666.375,00	59,17
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		36.762.047,00	23.095.672,00	13.666.375,00	59,17
1102	Retribusi Daerah-LO		17.500.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	133,33
1104	Lain-lain PAD yang Sah-LO		19.262.047,00	15.595.672,00	3.666.375,00	23,51
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO			36.762.047,00	23.095.672,00	13.666.375,00	59,17
2	BEBAN DAERAH		17.323.276.719,00	15.966.104.295,00	1.357.172.424,00	8,50
21	BEBAN OPERASI		17.323.276.719,00	15.966.104.295,00	1.357.172.424,00	8,50
2101	Beban Pegawai		11.786.416.022,00	12.272.319.513,00	(485.903.491,00)	-3,96
2102	Beban Barang dan Jasa		4.789.793.347,00	3.043.837.729,00	1.745.955.618,00	57,36
210201	Beban Barang		820.188.085,00	311.992.656,00	508.195.429,00	162,89
210202	Beban Jasa		1.818.672.594,00	1.304.270.093,00	514.402.501,00	39,44
210203	Beban Pemeliharaan		340.131.510,00	275.905.250,00	64.226.260,00	23,28
210204	Beban Perjalanan Dinas		1.810.801.158,00	1.139.669.730,00	671.131.428,00	58,89
210205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	-100,00
2108	Beban Penyusutan dan Amortisasi		747.067.350,00	649.947.053,00	97.120.297,00	14,94
24	BEBAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAERAH			17.323.276.719,00	15.966.104.295,00	1.357.172.424,00	8,50
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL			(17.286.514.672,00)	(15.943.008.623,00)	(1.343.506.049,00)	8,43
3	SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
31	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3101	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3102	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
32	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3201	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3202	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
41	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Pendapatan Luar Biasa-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
42	BEBAN LUAR BIASA-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Beban Luar Biasa-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA			0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO			(17.286.514.672,00)	(15.943.008.623,00)	(1.343.506.049,00)	8,43

Madiun, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM.
NIP. 19670221 198809 1 001

VIII. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Ekuitas Awal		33.441.531.672,00	32.077.551.971,00
2	Surplus/Defisit - LO		(17.286.514.672,00)	(15.943.008.623,00)
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		16.586.350.444,00	15.385.484.389,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		303.224.308,00	1.921.503.935,00
	Ekuitas Akhir (1+2+3+4)		33.044.591.752,00	33.441.531.672,00

Madiun, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM.

NIP. 19670221 198809 1 001

IX. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan;

Maksud disusunnya Laporan Keuangan pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) adalah sebagai berikut :

- a. Menyajikan Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, Ekonomi Makro, pencapaian target Undang – Undang / APBN berikut kendala yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun 2023;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi yang dihasilkan oleh pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka keuangan;
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul berhubungan dengan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Bakorwil I Madiun adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan, sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat kepada peraturan perundangan yang berlaku menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan sebagai Laporan Keuangan Kepala OPD untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

2. Landasan Hukum Pelaporan Keuangan ;

Pelaporan keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E);

- n. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan; Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.
- c. Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD.
- d. Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan SKPD.
- e. Penutup.

B. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah;

Indikator pencapaian kinerja keuangan dan Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun pencapaian kinerja keuangan Bakorwil I Madiun Tahun 2023 secara umum sebagai berikut :

Belanja daerah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 17.316.476.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.623.112.491,00 atau sebesar 96.00 %, meliputi 2 Program dan 7 kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.816.476.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 15.152.316.590,00 atau sebesar 95,80 %, terdiri dari kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.053.710,00 terealisasi sebesar Rp. 7.933.150,00 atau sebesar 98,50 %.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.444.094.890,00, telah terealisasi sebesar Rp. 11.797.999.822,00 atau sebesar 94,81%.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 542.037.720,00 terealisasi sebanyak Rp. 540.126.550,00 atau sebesar 99,65%.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.364.438.050,00 terealisasi sebanyak Rp. 1.356.824.738,00 atau sebesar 99,44%.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.080.318.630,00 terealisasi sebanyak Rp. 1.073.799.260,00 atau sebesar 99,40%.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 377.533.000,00 terealisasi sebanyak Rp. 375.633.070,00 atau sebesar 99,50 %.

2. Program Pelayanan Penghubung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 1.470.795.901,00 atau sebesar 98,05 %.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dalam pencapaian target yang telah di tetapkan antara lain sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan program yang melibatkan lintas dinas/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara Kualitatif dalam pemahaman tupoksi.
- c. Masih lemahnya perencanaan.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun), menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan, unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran meliputi pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Menurut PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer, serta lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun dari Pos Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2023 Bakorwil I Madiun menargetkan perolehan pendapatan daerah sebesar Rp. 23.800.000,00 yang diperoleh dari pos Pendapatan Retribusi Daerah yaitu dari retribusi pemakaian ruang rapat sebesar Rp. 9.000.000,00 serta Lain-lain PAD yang sah yaitu dari Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 14.800.000,00. Adapun Total pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 36.762.047,00 atau 154,46% dari total target pendapatan di Tahun 2023, dengan rincian perolehan pendapatan dari Retribusi Pemakaian Ruang Rapat sebesar Rp. 17.500.000,00 selebihnya diperoleh dari Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (Hasil Sewa Barang Milik Daerah) berupa sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 19.262.047,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sewa gedung dan bangunan a/n KPRI Karya Praja berdasarkan perjanjian sewa Nomor : 020/ 001 /211.1/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp. 12.000.000 per tahun yang dibayarkan setiap triwulan, sehingga setiap bulannya diakui sebagai piutang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,00.
2. Sewa gedung dan bangunan rumah dinas berdasarkan surat keputusan kepala Bakorwil I Madiun No. 028/001/211.1/2023 a/n :
 - a. Wardoyo dengan luas bangunan 182.05 M² biaya sewa Rp. 1.441.836,00 per tahun, dengan pembebanan Rp. 120.153,00.
 - b. Ribut Swasono dengan luas bangunan 182.05 M² biaya sewa Rp. 1.441.836,00 per tahun, dengan pembebanan Rp. 120.153,00.

2. Belanja Daerah

Belanja pada Bakorwil I Madiun terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi dengan jumlah anggaran sebesar 17.273.175.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 16.581.291.335,00 (95,99 %) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 12.432.404.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.786.416.022,00 atau 94,80 %.
- b. Belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 4.840.771.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.794.875.313,00 atau sebesar 99,05 %.

Sedangkan belanja modal dengan anggaran sebesar Rp. 43.301.000,00 terealisasi sebesar Rp. 41.821.156,00 atau sebesar 96,58 %.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Bakorwil I Madiun baik pembiayaan penerimaan maupun pembiayaan pengeluaran pada tahun 2023 adalah nihil.

b. Neraca

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam hal ini aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar berupa kas dan setara kas. Sementara aset non lancar terdiri dari aset tetap

dan aset lainnya. Aset Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat. aset lancar pada Bakorwil I Madiun antara lain adalah kas, piutang dan persediaan Pada suatu neraca. Untuk kas dan piutang saldo pada akhir Desember 2023 adalah nihil, sedangkan untuk persediaan, saldo akhir Desember 2023 Rp. 713.200,00 Dengan rincian sebagai berikut :

TABEL DAFTAR PERSEDIAAN

NO	PERSEDIAAN		SALDO AWAL PER 1 JAN 2023	SALDO AKHIR PER 31 DES 2023
	KODE	URAIAN		
1	2	3	4	5
1	111201010001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0
2	111201010002	Bahan Kimia	0	0
3	111201010004	Bahan Bakar dan Pelumas	0	0
4	111201030001	Alat Tulis Kantor	438.000,00	178.500,00
5	111201030002	Kertas dan Cover	163.800,00	158.700,00
6	111201030003	Bahan Cetak	0	0
7	111201030004	Benda Pos	0	0
8	111201030006	Bahan Komputer	95.000,00	376.000,00
9	111201030007	Perabot Kantor	0	0
10	111201030008	Alat Listrik	0	0
11	111201030009	Perlengkapan Dinas	0,00	0
12	111201030012	Suvenir/Cendera Mata	0	0
13	111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0
14	111201070001	Natura	0	0
TOTAL			696.800,00	713.200,00

Tabel 1

b. Aset Tetap

Jumlah aset tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp. 44.791.073.709,00 yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan belum memperhitungkan Depresiasi (Penyusutan). Berikut adalah daftar mutasi aset selama tahun 2023 :

TABEL MUTASI ASET TETAP

NO	KODE REKENING	URAIAN REKENING	KEADAAN AWAL 01 JANUARI 2023	MUTASI ASET TETAP		KEADAAN AKHIR 31 DESEMBER 2023
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)
1	1301	Tanah	29.475.500,00	-	-	29.475.500,00
2	1302	Peralatan dan mesin	8.141.712.979,00	910.425.156,00	-	9.052.138.135,00
3	1303	Gedung dan Bangunan	6.184.410.774,00		-	6.184.410.774,00
4	1304	Jalan, Irigasi dan jaringan	69.058.800,00		-	69.058.800,00
5	1305	Aset Tetap lainnya	9.966.000,00		-	9.966.000,00
		Total	43.880.648.553,00	910.425.156,00		44.791.073.709,00

Tabel 2

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 tahun 2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa /nilai residu.

Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 tahun 2013 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023, merupakan nilai buku per 31 Desember 2023.
- Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2023, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan yang tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Nilai Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.715.638.674,00 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL MUTASI PENYUSUTAN ASET TETAP

No	KODE REKENING	URAIAN REKENING	KEADAAN AWAL 01 JANUARI 2023	MUTASI ASET TETAP		KEADAAN AKHIR 31 DESEMBER 2023	KEADAAN AWAL 01 JANUARI 2023	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN		KEADAAN AKHIR 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU ASET TETAP
				BERTAMBAH	BERKURANG			BERTAMBAH	BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10	11=(8+9-10)	12=(7-11)
2	131	Tanah	29.475.500.000	-	-	29.475.500.000	-	-	-	-	29.475.500.000
3	132	Peralatan dan mesin	8.141.712.979	910.425.156	-	9.052.138.135	(6.850.617.788)	(1.214.016.028)	-	(8.064.633.816)	987.504.319
4	133	Gedung dan Bangunan	6.184.410.774	-	-	6.184.410.774	(3.539.328.844)	(97.556.514)	-	(3.636.885.358)	2.547.525.416
5	134	Jalan, Irigasi dan jaringan	34.980.000	-	-	34.980.000	(8.745.000,00)	(874.500)	-	(9.619.500)	25.360.500
6	135	Aset Tetap lainnya	44.044.800	-	-	44.044.800	(4.500.000)	-	-	(4.500.000)	39.544.800
TOTAL			43.880.648.553	910.425.156	-	44.791.073.709	(10.403.191.632)	(1.312.447.042)	-	(11.715.638.674)	33.075.435.035

Table 3

- **Ekstrakomtabel**

Ekstrakomtabel adalah catatan barang-barang inventaris yang termasuk golongan peralatan & mesin, gedung / bangunan, Jalan, jaringan dan instalasi maupun golongan Aset tetap lainnya Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi aset tetap, namun dimiliki dan atau dikuasai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Jumlah aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 56.426.000,00, nilai tersebut tidak mengalami perubahan, dikarenakan Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan aset Ekstrakomtabel, dan nilai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL DAFTAR ASET EKSTRAKOMTABEL

Golongan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Peralatan & Mesin	37.801.500,00	37.801.500,00
Gedung & Bangunan	14.664.500,00	14.664.500,00
Jalan,Irigasi& Jaringan	3.960.000,00	3.960.000,00
Asset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	0.00	0.00
Jumlah Ektra komtabel	56.426.000,00	56.426.000,00

Tabel 4

- **Aset lain – lain (Rusak Berat/Usang)**

Aset lain-lain merupakan aset pindahan dari aset tetap yang telah habis nilai bukunya dan dengan kondisi yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi atau aset tetap yang masih ada nilai bukunya namun tidak dapat digunakan lagi dikarenakan rusak, berikut adalah rincian aset lain-lain pada tahun 2023.

TABEL DAFTAR ASET LAIN-LAIN

Gol. Asset lain - lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah		0,00
Peralatan & Mesin	18.550.000,00	18.550.000,00
Gedung & Bangunan	0,00	0,00

Jalan,Irigasi& Jembatan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	0.00	0.00
Total Aset lainnya	18.550.000,00	18.550.000,00

Tabel 5

Jumlah aset lain - lain per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Aset tersebut direncanakan akan dihapus karena sudah tidak dapat digunakan, dengan rincian aset perbarangnya adalah sebagai berikut :

TABEL RINCIAN ASET LAIN-LAIN

NO	KODE REKENING	NAMA ASET	JUMLAH UNIT	ALASAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI AKUMULASI	NILAI BUKU ASET
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-7)
1	15040101	aset lain-lain (kendaraan roda 2)	2	rusak berat	17.500.000,00	17.500.000,00	-
2	15040101	aset lain-lain (sepeda)	1		1.050.000,00	1.050.000,00	-
TOTAL						18,550,000.00	-

Tabel 6

(2) Kewajiban

Kewajiban jangka panjang Bakorwil I Madiun pada tahun 2023 adalah nihil. Sedangkan untuk kewajiban jangka pendek masih terdapat tagihan hutang pada akhir tahun 2023 pada pos rekening belanja jasa sebesar Rp. 31.556.483,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Belanja Listrik : Rp. 24.703.708,00
2. Utang Belanja Air : Rp. 1.233.050,00
3. Utang belanja Telepon : Rp. 439.907,00
4. Utang Belanja Internet : Rp. 5.179.818,00

(3) Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada neraca yang menampung selisih antara aset dan kewajiban, pada Tahun 2022 total ekuitas akhir sebesar Rp. 33.441.531.672,00 dan pada tahun 2023 total ekuitas akhir Rp. 33.044.591.752,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp. 33.441.531.672,00 yang merupakan saldo akhir ekuitas pada tahun 2022.

2. Surplus/ Defisit LO

Defisit LO sebesar Rp. 17.286.514.672,00 nilai ini di dapatkan dari jumlah beban daerah dikurangi pendapatan daerah.

3. Ekuitas Untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 16.586.350.444,00 nilai ini merupakan *reciprocal account* atau jumlah akun penyeimbang semua transaksi antara SKPD dengan BUD.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp. 303.224.308,00, nilai tersebut didapatkan dari pengalihan status penggunaan dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

b. Laporan Operasional

1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO sebesar Rp. 36.762.047,00 terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp. 17.500.000,00 yang didapatkan dari retribusi pemakaian ruang rapat dan pendapatan lain – lain PAD yang sah sebesar Rp. 19.262.047,00 yang didapatkan dari sewa rumah dinas dan sewa bangunan untuk KPRI Karya Praja.

2. Beban- LO

Beban - LO sebesar 17.323.276.719,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Pegawai	: Rp. 11.786.416.022,00
2. Beban Barang dan Jasa	: Rp. 4.789.793.347,00

Untuk Beban Barang dan Jasa terdiri dari :

a. Beban Barang	Rp. 820.188.085,00
b. Beban Jasa	Rp. 1.818.672.594,00
c. Beban Pemeliharaan	Rp. 340.131.510,00
d. Beban Perjalanan Dinas	Rp. 1.810.801.158,00
3. Beban Penyusutan	: Rp. 649.947.053,00

3. Surplus/ Defisit – LO

Defisit LO sebesar Rp. 17.286.514.672,00 nilai ini di dapatkan dari jumlah pendapatan daerah dikurangi beban daerah.

C. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp. 33.441.531.672,00 yang merupakan saldo akhir ekuitas pada tahun 2022.

2. Surplus/Defisit LO

Defisit LO sebesar Rp. 17.286.514.672,00 nilai ini di dapatkan dari jumlah pendapatan daerah dikurangi beban daerah.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 16.586.350.444,00 nilai ini merupakan *reciprocal account* atau jumlah akun penyeimbang semua transaksi antara SKPD dengan BUD.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp. 303.224.308,00, nilai tersebut didapatkan dari pengalihan status penggunaan dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2023 sebesar 33.044.591.752,00 akumulasi dari ekuitas awal, Surplus / LO, Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

D. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Pada tahun 2023 terdapat perubahan pejabat di Bakorwil I Madiun sebagai berikut:

NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
Muhammad Arifin, S.E	Kasubid Pemerintahan II	Kasubag Keuangan
Cicilia Satyarini Y, S.E	Kasubag Keuangan	Kabid Pembangunan Ekonomi
SA. SAUD, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kasubid Pemerintahan II

Tabel 7

G. PENUTUP

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disusun sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, entitas akuntansi dalam hal ini OPD menyusun Laporan Keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional
- c. Neraca
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Di dalam Laporan Keuangan yang merupakan Pertanggungjawaban Kinerja Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) Tahun Anggaran 2023.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Bakorwil I Madiun Tahun Anggaran 2023. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan tugas seoptimal mungkin dalam hal pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten/Kota di wilayah kerja.